

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

KABUPATEN : PESISIR SELATAN
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENUNJANG URUSAN

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian / LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program nasional x 100 %			Tahun 2017 tidak ada alokasi program nasional yang harus di laksanakan BKPSDM
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang di tetapkan oleh pemerintah cq. Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standar Operational Procedure (SOP)	ada	Sebanyak : 35 yg terdiri dari 1. SOP pengentrian data keuangan pada aplikasi SIPKD 2. SOP pembayaran gaji pegawai 3. SOP pembayaran dana UP, GU, TU 4. SOP pembayaran tunjangan daerah 5. SOP pencairan ganti uang 6. SOP pencairan dana kegiatan langsung 7. SOP pencairan Tambah Uang 8. SOP pencairan Uang Persediaan 9. SOP penyampaian realisasi fisik kegiatan dan keuangan per bulan 10. SOP penyusunan LAKIP 11. SOP penyusunan LKPJ 12. SOP penyusunan LPPD 13. SOP penyusunan RKA 14. SOP penyusunan Renstra 15. SOP pengurusan kenaikan gaji	ada	

					berkala 16. SOP pengurusan surat keluar 17. SOP pengurusan surat masuk 18. SOP penyusunan formasi PNS 19. SOP penyusunan buku DUK dan Bezetting 20. SOP kenaikan pangkat 21. SOP pengajuan pensiun BUP, APS, Janda/Duda 22. SOP pengurusan Izin Belajar 23. SOP pengurusan tugas belajar 24. SOP pengurusan karis karsu 25. SOP pengurusan Kartu Pegawai 26. SOP pengurusan satya lencana karya satya 27. SOP pengurusan Taspen 28. SOP pengurusan Cuti 29. SOP pengurusan tentang perceraian/hukum disiplin 30. SOP Pengurusan KPE		
--	--	--	--	--	--	--	--

					31. SOP pengelolaan Data PNS untuk pihak ketiga 32. SOP pengelolaan Mutasi pindah 33. SOP Pengangkatan Jabatan 34. Prosedur Peninjauan Masa Kerja 35. Prosedur Penerbitan SK 80 % ke 100 %		
2.	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus di laksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100 %	Tdk ada Perda yg dilaksanakan BKPSDM yg berhubungan dg Permen	Tahun 2017 pelaksanaan tugas administrasi umum di bidang kepegawaian mengacu pada peraturan/ UU (BKN/Menpan)
3.	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eseloring yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yg ada x 100 % $16/16 \times 100 \% = 100 \%$	Jabatan yg ada sebanyak 16 Jabatan yg hrs ada 16	100%
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur BKPSDM	ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi	Analisis Kepegawaian	ada Jabatan fungsional : Analisis Kepegawaian
4.	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS BKPSDM terhadap total PNS Kab. $45 / 7.168 = 0,0062$	PNS BKD sebanyak 45 orang total PNS Kab. 7168 orang	0,62 %
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat BKPSDM yang ada x 100 % $6/16 \times 100 \% = 37,5 \%$	pejabat yang telah mengikuti diklat pim sesuai perjenjangan , sebanyak 6 orang Pejabat yang ada sebanyak 16 orang	37,5 %
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat BKPSDM yang ada x 100 %	pejabat yg memenuhi kepangkatan sebanyak 10 orang jabatan yg ada sebanyak 16 jabatan	62,5 %
5.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang di miliki oleh BKPSDM	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan pada BKPSDM	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan BKPSDM berikut jumlahnya	Dokumen perencanaan yg ada pd BKPSDM Tahun 2017	

				- RENSTRA BKPSM - RENJA BKPSDM - RKA BKPSDM		- RENSTRA, ADA, 1 Exs - RENJA, ADA, 1 Exs - RKA, ADA, 1 Exs	3 (tiga) jenis dokumen	
		Sinkronisasi program RENJA BKD dengan Program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam renja BKPSDM	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam RENJA BKPSDM dibagi jumlah program dalam RENJA BKPSDM yang ditetapkan pada RPJMD x 100 %	- Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja BKPSDM sebanyak 5 program - Jumlah program renja BKPSDM yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program	100%	
		Sinkronisasi program RKA BKPSDM dengan Program RENJA BKPSDM	11	Jumlah program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA BKPSDM	Jml program Renja RKPD yang diakomodir dalam RKA BKPSDM dibagi jumlah program dalam RKA BKPSDM x 100 %	Jumlah program renja RKPD yang diakomodir dalam RKA BKPSDM sebanyak 7 Program Jumlah program yang ada dalam RKA BKPSDM sebanyak 7 program	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program Renja BKPSDM yang diakomodir dalam DPA BKPSDM	Jumlah program Renja BKPSDM yang diakomodir dalam DPA BKPSDM dibagi jumlah program dalam DPA BKPSDM x 100 %	Program Renja BKPSDM yang diakomodir dalam DPA BKPSDM sebanyak 7 program Program dalam DPA BKPSDM sebanyak 7 program	100%	
6.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	realisasi belanja BKPSDM terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja BKPSDM dibagi total APBD x 100 %	Total realisasi belanja BKPSDM sebesar Rp. 7.543.545.558, - Total belanja APBD sebanyak Rp. 1.683.578.202.919,97	0,44%	
		Besaran belanja modal	14	Belanja Modal terhadap total belanja BKPSDM :	Belanja modal dibagi total belanja BKPSDM x 100 %	Belanja modal BKPSDM sebesar Rp. 398.917.150,- Total belanja BKPSDM sebesar Rp. 7.543.545.558,-	5,28 %	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa BKPSDM x 100 %	- Total belanja pemeliharaan sebesar Rp. 31.401.000,-	0,83 %	

						- Total belanja barang dan jasa BKPSDM sebesar Rp. 3.776.863.971,-		
		Laporan keuangan BKPSDM	17	Keberadaan laporan keuangan BKPSDM (Neraca, Calk)	Ada, laporan keuangan sebanyak 6 jenis - Neraca, ada - Catatan atas laporan keuangan, ada - Laporan SPJ Fungsional, ada - Laporan SPJ, ada - Laporan Kegiatan, ada - Laporan realisasi anggaran, ada	Laporan keuangan yg ada sebanyak 6 jenis, sbb : - Neraca, ada - Catatan atas laporan - Laporan SPJ Fungsional, ada - Laporan SPJ, ada - Laporan Kegiatan, ada - Laporan realisasi anggaran, ada	Ada 6 jenis	
7.	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset BKPSDM	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset BKPSDM	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset BKPSDM	- Buku Inventaris - Rekapitulasi buku inventaris - Kartu inventaris barang	Ada, 3 jenis dokumen	
		Penggunaan aset BKPSDM	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh BKPSDM	Aset yang tidak digunakan BKPSDM dibagi total aset yang dikuasai perangkat daerah x 100 %	Aset yang tidak digunakan sebesar Rp. 87.796.038,- aset yang dikuasai BKPSDM sebesar Rp. 3.307.376.015,-	2,65 %	

8.	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk - bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 1. Pengumuman di mass media	Jumlah fasilitas/ prasarana partisipasi	pengumuman mengenai kegiatan: 1. Rakor Kepegawaian 2. AMT 3. Sosialisasi TPP	jumlahnya sebanyak 3 jenis
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	-	tdk ada

Painan, Februri 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

AHDA YANUAR, S.Kom
NIP. 19670101 199003 1 013

B. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

1. Belum adanya kepastian jadwal dari pemerintah pusat tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh pertanian
2. Terjadinya mutasi jabatan pada bulan Oktober 2016, sehingga pejabat eselon II yang menjadi anggota tim Baperjakat tidak bisa dibayarkan honorariumnya sampai akhir Desember 2016
3. Kegiatan penyediaan listrik/penerangan bangunan kantor tidak mencapai target karena kesalahan dalam penganggaran pemasangan daya instalasi listrik tidak bisa dilakukan.

2. Solusi :

1. Mengevaluasi lagi lebih lanjut mengenai anggaran agar bisa direalisasikan sebaik mungkin
2. Mengevaluasi kembali target-target pencapaian kegiatan serta melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi

C. Hal - hal yang perlu dilaporkan

1. Seluruh Program yang telah dilaksanakan tahun 2016, sumber dananya berasal dari APBD Kab. Pesisir Selatan tahun 2016.
2. Seluruh Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2016, telah sinkron dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pesisir Selatan serta isu - isu strategis yang berkembang saat ini.

Painan, Februri 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM

AHDA YANUAR, S.Kom
NIP. 19670101 199003 1 013

1. SKPD Pelaksanaan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**Urusan yang dilaksanakan :**

1. Penunjang urusan pemerintah daerah

URUSAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**A. Program dan Kegiatan (Jumlah Program sebanyak 7 program dan Kegiatan sebanyak 46 kegiatan)****Rincian Program dan Kegiatan :**

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARA AN
1	2	3	4	5
	URUSAN : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		103,300,000	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8,011,200	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	88,750,000		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26,000,000		
5	Penyediaan ATK		44,753,962	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		56,009,995	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor		5,510,100	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per UU		9,320,000	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman		29,975,000	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		193,400,000	
11	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		61,300,000	
12	Penyebarnya Informasi Pembangunan		25,000,000	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			

2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			
4	Pemeliharaan Rutin/Barkala Kendaraan Dinas/Operasional		102,322,500	16,000,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		13,002,000	23,800,000
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Penunjang Bimtek dan Kursus Keterampilan		50,000,000	
2	Diklat Teknis Fungsional Pol PP	1,800,000	56,799,400	
3	Pelaksanaan Achivement Motivation Training (AMT)		111,369,564	
4	Sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		59,024,722	
5	Sosialisasi tentang Penyusunan TPP		42,418,302	
IV.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD		9,294,244	
V.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			
1	Pelaksanaan Festival Langkisau		15,000,000	
VI.	Program Pendidikan Kedinasan			
1	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	12,600,000	395,746,900	
2	Pendidikan dan Pelatihan PIM TK. IV		519,618,872	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan bagi CPNS		396,018,530	
VII.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			
1	Seleksi Penerimaan CPNS	27,000,000	103,850,000	
2	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	14,400,000	318,963,768	

3	Penyusunan Formasi PNS	33,150,000	68,368,000	
4	Penyusunan Rencana Karir PNS, DUK dan Bazetting	9,600,000	36,576,940	
5	Pengelolaan ADM Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen	3,600,000	45,788,884	
6	Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai	31,000,000	6,602,682	
7	Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	23,500,000	25,469,208	
8	Pelayanan dan Pendistribusian serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik		36,304,080	
9	Pengkoreksian Angka Kredit	7,350,000	25,217,058	
10	Pengelolaan Administrasi Mutasi Pegawai		47,059,640	
11	Pengelolaan Administrasi Pensiun Pegawai	3,600,000	79,732,880	
12	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	92,250,000	66,283,410	
13	Pemeriksaan Kasus PNS dan Masalah Perceraian	6,750,000	38,374,644	
14	Pemberian Satyalencana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun	3,600,000	28,197,982	
15	Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai	30,450,000	166,097,472	
16	Pemetaan Potensi Pejabat Struktural		502,404,160	
17	Rakor Kepegawaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kab/Kota se-Sumatera Barat		100,906,000	
18	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan		31,430,754	
19	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		70,618,224	
	TOTAL	415,400,000	4,105,441,077	39,800,000

BELANJA LANGSUNG					
		REALISASI			
BELANJA MODAL	TOTAL	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA PEMELIHARAAN	BELANJA MODAL
6	7=(3+4+5+6)	8	9	10	11
	103,300,000		96,623,395		
	8,011,200		8,011,200		
	88,750,000	87,991,000			
	26,000,000	26,000,000			
	44,753,962		44,444,000		
	56,009,995		56,009,900		
38,581,000	44,091,100		5,510,100		34,072,250
6,000,000	15,320,000		9,205,000		5,983,400
	29,975,000		29,947,600		
	193,400,000		191,498,652		
	61,300,000				61,015,000
	25,000,000		19,142,500		
138,000,000	138,000,000				128,476,500

34,800,000	34,800,000				34,800,000
196,419,000	196,419,000				195,585,000
	118,322,500		99,902,974	7,800,000	
	36,802,000		12,948,750	23,601,000	
	50,000,000		49,886,400		
	58,599,400	1,800,000	36,924,400		
	111,369,564		105,707,369		
	59,024,722		47,081,400		
	42,418,302		42,417,802		
	9,294,244		9,292,800		
	15,000,000		15,000,000		
	-				
	408,346,900	12,600,000	392,641,246		
	519,618,872		505,288,622		
	396,018,530		364,438,600		
	130,850,000	26,830,000	102,283,600		
	333,363,768	14,400,000	275,587,584		

	101,518,000	33,150,000	66,020,559		
	46,176,940	9,600,000	36,222,240		
	49,388,884	3,600,000	44,535,134		
	37,602,682	29,750,000	4,707,280		
	48,969,208	22,250,000	24,119,144		
	36,304,080		35,619,758		
	32,567,058	7,350,000	23,018,400		
	47,059,640		45,402,090		
	83,332,880	3,600,000	79,548,080		
	158,533,410	91,210,000	65,671,456		
	45,124,644	6,750,000	37,949,340		
	31,797,982	3,600,000	28,026,364		
	196,547,472	29,850,000	165,409,956		
	502,404,160		463,487,181		
	100,906,000		96,406,871		
	31,430,754		31,189,500		
	70,618,224		53,470,724		
413,800,000	4,974,441,077	410,331,000	3,820,597,971	31,401,000	459,932,150

	TINGKAT CAPAIAN (%)
TOTAL	
12=(8+9+10+11)	13
96,623,395	93.54
8,011,200	100.00
87,991,000	99.14
26,000,000	100.00
44,444,000	99.31
56,009,900	100.00
39,582,350	89.77
15,188,400	99.14
29,947,600	99.91
191,498,652	99.02
61,015,000	99.54
19,142,500	76.57
128,476,500	93.10

34,800,000	100.00
195,585,000	99.58
107,702,974	91.02
36,549,750	99.31
49,886,400	99.77
38,724,400	66.08
105,707,369	94.92
47,081,400	79.77
42,417,802	100.00
9,292,800	99.98
15,000,000	100.00
-	#DIV/0!
405,241,246	99.24
505,288,622	97.24
364,438,600	92.03
129,113,600	98.67
289,987,584	86.99

99,170,559	97.69
45,822,240	99.23
48,135,134	97.46
34,457,280	91.64
46,369,144	94.69
35,619,758	98.12
30,368,400	93.25
45,402,090	96.48
83,148,080	99.78
156,881,456	98.96
44,699,340	99.06
31,626,364	99.46
195,259,956	99.34
463,487,181	92.25
96,406,871	95.54
31,189,500	99.23
53,470,724	75.72
4,722,262,121	94.97

**TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017**

OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KET
KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Kabupaten dibagi jumlah penduduk : $7.168 / 545.712 = 0,013$	Jumlah PNS Kabupaten tahun 2017 sebanyak 7168 orang Jumlah penduduk Kabupaten tahun 2017 sebanyak 545.712 orang	1,33%	
		22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada Data Base Kepegawaian	SIMPEG	Ada	

Painan, Februari 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

AHDA YANUAR, S.Kom
NIP. 19670101 199003 1 013

DATA KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PER 31 DESEMBER 2017

No	Nama/ NIP	Jabatan			Kualifikasi Pendidikan Terakhir					Jenis Kelamin		Golongan				Pendid
		Nama Jabatan	Struktural	Fungsional	SD/SLTP	SLTA	DIII	S1	S2	LK	PR	I	II	III	IV	
1	Ahda Yanuar, S.Kom NIP. 19670101 199003 1 013	Kepala BKPSDM	Eselon II	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	-	v	-
2	Dra. Riko, MM NIP. 19671006 198903 2 004	Sekretaris BKPSDM	Eselon III	-	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-
3	Hendrawati, SE NIP. 19720729 200604 2 003	Kabid Pengembangan Potensi dan Penilaian Kinerja ASN	Eselon III	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
4	Iwardi, SH NIP. 19670601 199503 1 002	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN	Eselon III	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	-	v	-
5	Pesmar, SE NIP. 19670223 199703 1 002	Kabid Mutasi dan Promosi ASN	Eselon III	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-
6	Syanti Erna Ayu, S.ST, M.Si NIP. 19850110 200501 2 002	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Eselon IV	-	-	-	-	-	v	-	v	-	-	v	-	-
7	Eflizar M, SH NIP. 19650505 198602 1 008	Kasubbid Pemberhentian ASN	Eselon IV	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-
8	Rosmaniar, SH NIP. 19670719 198702 2001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
9	Yetmayenti, SH NIP. 19630514 199103 2 003	Kasubbid Pendidikan, Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional	Eselon IV	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
10	Ade Marlina, S.Psi, M.Ec.Dev NIP. 19830329 200902 2 003	Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN	Eselon IV	-	-	-	-	-	v	-	v	-	-	v	-	-
11	Yulwidya Isfa Putra, SE NIP. 19830726 201001 1 028	Kasubbid Pendidikan, Pelatihan, Perjenjangan dan Sertifikasi	Eselon IV	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-
12	- NIP. -	Kasubbid Pengadaan dan Formasi ASN	Eselon IV	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
13	Andri, SH NIP. 19850213 200501 1 002	Kasubbid Mutasi dan Pengembangan Karir ASN	Eselon IV	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-
14	Syafrino, SAP NIP. 19840430 200501 1 002	Kasubbid Promosi dan Kesejahteraan ASN	Eselon IV	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-
15	Muhaimin Zurna, SE, M.CIO NIP. 19840116 200604 2 003	Kasubbid Profesi, data dan informasi ASN	Eselon IV	-	-	-	-	-	v	-	v	-	-	v	-	-

16	Afrianto, SE NIP. 19780205 200604 1 016	Kasubbid Kepangkatan PNS	Eselon IV	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-
17	Dewi Listyawati, S.Kom NIP. 19810102 201001 2 019	Tugas Belajar		-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
18	Musdawati NIP. 19650302 198602 2 001	Staf	-	-	-	v	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-
19	Karmila Sari, S.Sos NIP. 19860420 201001 2 029	Staf	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
20	Junaidi, S.Sos NIP. 19770207 201001 1 012	Staf	-	v	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-
21	Darmiati NIP. 19681110 199203 2 002	Staf	-	-	-	v	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-
22	Jasmiati NIP. 19710109 199701 2 001	Staf	-	-	-	v	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-
23	Fio Denci Fakhrya, SH NIP. 19840723 200701 2 001	Staf	-	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
24	Eli Ermi, SE NIP. 19680210 200604 2 002	Staf	-	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
25	Isdia Nofitri Zulda, S.Si NIP. 19791125 201407 2 001	Staf	-	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
26	Muhammad Kadri, S.AP NIP. 19831114 200701 1 003	Staf	-	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-
27	Eka Sry Nofriyeni, A.Md NIP. 19671127 200801 2 003	Staf	-	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-
28	Fera Nofita Sari,SIP NIP. 19770224 200604 2 012	Staf	-	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
29	Fatma Hayani,SE NIP. 19830316 201001 2 033	Staf	-	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
30	Duna Gespin, S.Kom NIP. 19800727 201001 1 021	Staf	-	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-
31	Adrianto, S.Sos NIP. 19810227 200701 1 005	Staf	-	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-	v	-	-
32	Ria Siska M Gucen, A.Md NIP. 19870702 200902 2 005	Staf	-	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-
33	Enggri Junaidi NIP. 198004 200902 1 006	Staf	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-	v	-	-
34	Nofemrianti, SE NIP. 19811128 201001 2 017	Staf	-	-	-	-	-	v	-	-	v	-	-	v	-	-
35	Lendra Wati, A.Md NIP. 19810219 200904 2 002	Staf	-	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-

36	Amiliosa Yunita, A.Md NIP. 19870707 201001 2 031	Staf	-	-	-	-	v	-	-	-	v	-	v	-	-	-
37	Eza Putri Nanda Sari, A.Md NIP. 19860702 201001 2 033	Staf	-	-	-	-	v	-	-	-	v	-	v	-	-	-
38	Harry Yusman NIP. 19830511 200701 1 001	Staf	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-
39	Yusri Japriska NIP. 19850107 200801 1 001	Staf	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-
40	Wiwik Muniarti NIP. 19821226 200801 2 002	Staf	-	-	-	v	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-
41	Desi Wahyuni Syaf NIP. 19821202 201001 2 005	Staf	-	-	-	v	-	-	-	-	v	-	v	-	-	-
42	Riswan Jonedi NIP. 19820101 201001 1 024	Staf	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-
43	Masri Afrianto NIP. 19830416 201407 1 002	Staf	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-
44	Joni Yanbastian NIP. 19850128 201407 1 001	Staf	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-
45	Rocky Armando NIP. 19860115 201407 1 001	Staf	-	-	-	v	-	-	-	v	-	-	v	-	-	-

Painan, F
KEPALA BADAN KEF
DAN PENGEN

AHDA YAN
Nip. 1967010

[illegible]

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Februari 2018
 PEGAWAIAN DAERAH
 IBANGAN SDM

IUAR,S.Kom
 1 199003 1 013

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

- A. SKPD Pelaksana :
- B. Forum Koordinasi :
- C. Materi Koordinasi :
- D. Instansi Vertikal yang terlibat :
- E. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan :
- G. Hasil dan Manfaat Koordinasi :
- H. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi :
- I. SDM Pendukung Program dan Kegiatan:
 - 1 Jumlah Pegawai :
 - 2 Kualifikasi Pendidikan :
 - 3 Pangkat dan Golongan :
 - 4 Jumlah Pejabat Struktural :

NIHIL

Painan, Februari 2018
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

AHDA YANUAR, S.Kom
19670101 199003 1 013

KERJASAMA ANTAR DAERAH

SKPD Pelaksana

Bidang

- 1 Daerah yang diajak kerjasama :
- 2 Dasar Hukum :
- 3 Nama Program dan Kegiatan :
- 4 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan :
- 5 Sumber dan Jumlah Anggaran :
- 6 Jangka Waktu kerjasama :
- 7 Hasil (Output) dari Kerjasama :
- 8 Permasalahan dan Solusi :
- 9 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan :

NIHIL

Painan, Februari 2018
Kepala Badan Kepegawai dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

AHDA YANUAR, S.Kom
Nip. 19670101 199003 1 013

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

- A. OPD PELAKSANA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
 B. TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	BIDANG KERJASAMA	ANGGARAN		SKPD PELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN	PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
		ALOKASI	REALISASI				
		N	I	H	I	L	

Painan, Februari 2018
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

AHDA YANUAR, S.Kom
 Nip. 19670101 199003 1 013

TUGAS PEMBANTUAN

OPD PELAKSANA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- I. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 BIDANG
 A. DASAR HUKUM
 B. INSTANSI PEMBERI TUGAS
 C. SKPD PELAKSANA
 D. TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	BIDANG KERJASAMA	ANGGARAN		SKPD PELAKSANA	TINGKAT CAPAIAN	PROSES PERENCANAAN	INDISI SARANA DAN PRASARA YANG DIGUNAKAN
		ALOKASI	REALISASI				
		N	I	H	I	L	

Painan, Februari 2018
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

AHDA YANUAR, S.Kom
 Nip. 19670101 199003 1 013

NA

KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL D

OPD PELAKSANA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BIDANG : -

- 1 Forum Koordinasi
- 2 Materi Koordinasi
- 3 Instansi vertikal yang terlibat
- 4 Sumber dan jumlah anggaran
Satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan koordinasi dengan instansi
vertikal di daerah
- 5 Satuan kerja perangkat daerah penyelenggaraan kerjasama antar daerah
Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan (pegawai yang
menangani kerjasama)
- 6 Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
- 7 Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan
- 8 Hasil dan manfaat koordinasi
- 9 Tindak lanjut hasil koordinasi
- 10 Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan
- 11
- 12

DI DAERAH

NIHIL

Painan, Februari 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

AHDA YANUAR, S.Kom
Nip. 19670101 199003 1 013

PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

OPD PELAKSANA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG :

- 1 Jenis kawasan khusus
- 2 Status kepemilikan kawasan khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan dasar hukum penetapannya
- 3 Sumber anggaran
- 4 Permasalahan yang dihadapi
- 5 Satuan kerja perangkat daerah yang menangani kawasan khusus
- 6 Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

N

P
KEPALA
PENGEMB

A
Nip

IS

TIHIL

ainan, Februari 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

WHA YANUAR, S.Kom
N. 19670101 199003 1 013

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETE

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

- 1 Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, saparatisme, atau lainnya)
- 2 OPD yang menangani
- 3 Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
- 4 Penanggulangan dan kendalanya
- 5 Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan
- 6 Sumber dan jumlah anggaran

N:

P
KEPALA
PENGEMB

A
Nip

RTIBAN UMUM

IHIL

ainan, Februari 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
ANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

YHDA YANUAR, S.Kom
J. 19670101 199003 1 013